BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam dunia yang tersusun atau terorganisir dengan komplek dan tersusun dari beberapa subsistem yang berbeda satu sama lainnya dan berinteraksi pada tingkat tertentu dinamakan sistem, sistem ini sebagai kumpulan dari komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu (Azhar Susanto, 2002:23).

Sistem terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran satuan usaha dapat dicapai, kebijakan dan prosedur ini disebut pengendalian internal, secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian internal (Siti Kurnia, 2010:294).

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comissions*) mengemukakan sistem yang lebih komprehensif di mana struktur pengendalian internal ini dianggap relevan untuk mencapai tujuan organisasi baik tujuan keuangan maupun non keuangan (Azhar Susanto, 2002:103). Kategori yang berlaku yaitu efektivitas dan efisiensi dalam operasi, reliabilitas laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Wilkinson, 2000).

Pengendalian internal merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang

dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan seperti, kendala pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi (Siti Kurnia, 2010:221).

Struktur pengendalian internal merupakan susunan dari unsur-unsur atau komponen pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan (Azhar Susanto, 2002:129). Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010:238) menyatakan pengendalian internal ini memiliki keterbatasan yaitu adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan, adanya kolusi, penyimpangan manajemen, serta biaya pengendalian intenal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan.

Lembaga pelayanan publik seperti Kantor Pajak tidak efektif pengendalian internalnya, lemahnya pengendalian internal seperti dalam kasus pajak mencerminkan bobroknya wajah birokrasi pelayanan publik (Zainal Arifin, 2010). Maka Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menambah kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pajak untuk menguatkan sistem pengendalian kontrol di kantor pajak (Agus Martowardojo, 2010).

Sistem informasi juga diperlukan dalam mengatasi lemahnya pengendalian internal pada sistem dan prosedur yang mengatur suatu transaksi, maka setiap perusahaan perlu menyusun suatu sistem dan prosedur yang dapat menciptakan pengendalian intern yang baik dalam mengatur pelaksanaan transaksi (Tiolina Evi, 2009).

Pemerintah mengadopsi sistem *online* dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, melalui Sistem elektronik Pengadaan Pemerintah (SePP) diharapkan penyediaan barang/jasa dapat dipantau lebih optimal, namun saat ini masih menunggu RPP karena masih terbentur dengan peraturan di masing-masing instansi (M Tjiptardjo, 2010). Sehingga sistem data-data pajak tidak langsung *update* karena sistem informasi dan teknologi di Ditjen Pajak tidak langsung terhubung dengan bank tempat pembayaran pajak (Darussalam, 2010).

Sistem informasi akuntansi yang dapat diandalkan adalah sistem yang mempunyai pengendalian memadai sehingga informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat diandalkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini pengendalian merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi akuntansi yang ada (Romney et al, 2003).

Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/ komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Azhar Susanto, 2008:72).

Implementasi sistem informasi akuntansi mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik, dan mengakibatkan sistem pengawasan intern lebih efektif, dan meningkatkan mutu (Mahdi Sajady, 2008).

Sistem informasi akuntansi (SIA) pada dasarnya merupakan integrasi dari berbagai sistem pengolahan tansaksi (SPT) atau sub SIA, karena setiap SPT memiliki siklus pengolahan transaksi maka SIA juga dapat dikatakan sebagai

integritas dari berbagai siklus pengolahan transaksi, dalam setiap pengolahan transaksi yang dilakukannya, SPT atau sub SIA memiliki berbagai komponen seperti *hardware, software, brainware, prosedur, database*, dan jaringan komunikasi (Azhar Susanto, 2002:82).

Integrasi dari komponen-komponen tersebut diatas merupakan sumber daya informasi guna mencapai keunggulan substansial (McLeod dan Schell, 2007:29). Menurut Rodin Brown dalam Siti Kurnia Rahayu (2011) menyatakan integrasi adalah kunci sukses implementasi sistem informasi, sistem informasi yang terintegrasi akan menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan konsisten bagi manajemen.

Sistem informasi yang terintegrasi didefinisikan oleh Marcus (2009:2) sebagai proses menghasilkan informasi yang terorganisir di dalam sistem informasi yang terdiri dari *hardware, software, databases* dan *telecommunication network*, serta adanya interaksi dan komunikasi manusia sebagai pengguna. Di setiap komponen sistem informasi akuntansi tersebut masing-masing berintegrasi secara harmonis pula (Azhar Susanto, 2008: 72-75) untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Saat ini yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkaitan dengan tiga komponen SIA, yaitu: *software* (perangkat lunak), *brainware* (sumber daya manusia), dan *network* (jaringan telekomunikasi), sebagai salah satu instrumen penting dalam menghimpun penerimaan negara melalui pembayaran pajak, DJP memiliki sebuah *software* yakni sistem aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2007 (Heryanto Sijabat, 2011).

Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini *software* tersebut belum sepenuhnya terintegrasi, hal itu menyebabkan sering terjadinya perbedaan pencatatan antara Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan Negara (Melkias Markus Mekeng, 2010). Tidak terintegrasinya *software* tersebut juga menjadi salah satu temuan BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2010 dikarenakan pencatatan penerimaan menurut kas negara dan DJP menunjukkan jumlah yang berbeda (Taufiequrachman Ruki, 2011).

Selain itu pada komponen *database* dalam Sistem Informasi Akuntansi Ditjen Pajak yaitu belum terintegrasinya data, terjadi kegagalan migrasi data (Siti Kurnia, 2011). Sedangkan Integrasi *database* dalam sistem informasi akuntansi menuntut kesesuaian antara *database* yang digunakan (isi dan hubungannya) dengan kebutuhan pemakai, dan ditunjang oleh prosedur yang cocok (Azhar Susanto, 2008:82).

Seperti yang dipaparkan oleh Chandra Budi yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2011) menyatakan bahwa integrasi juga dibutuhkan pada sistem *online* antara DJP Bank dan Ditjen Perbendaharaan yang diterapkan pada MPN (Modul Penerimaan Negara). Keharmonisan teknologi yang digunakan dalam jaringan komunikasi *(network)* harus sesuai dengan *hardware*, *software* sistem operasi yang digunakan, kebutuhan dan kemampuan *brainware* yang menjalankan, prosedur, dan data yang didistribusikan (Azhar Susanto, 2008:83). Ternyata *hardware* yang digunakan oleh Ditjen Pajak kualitasnya belum sesuai dengan kebutuhan pengguna (Agus Martowardojo, 2010).

Selain itu menurut Taufik dalam Siti Kurnia (2011) terdapat pula masalah pada komponen jaringan telekomunikasi dalam Sistem Informasi Akuntansi Ditjen Pajak yaitu koneksi data KPP ke Kantor Pusat yang sering terputus pada yang dipicu transisi jaringan dari *provider, a*kibat kondisi tersebut maka KPP harus melakukan perekaman data secara manual, dan berakibat pada menumpuknya data wajib pajak yang tidak bisa terekam di *database* kantor pusat Ditjen Pajak.

Fenomena-fenomena pada sistem informasi akuntansi DJP diatas menurut Anwar Nasution dalam Siti Kurnia (2011) tentunya menimbulkan masalah, yaitu secara umum informasi penerimaan pajak yang disajikan oleh aplikasi MPN (Modul Penerimaan Negara) Ditjen Pajak menjadi kurang akurat, selain itu adanya keterbatasan akses informasi Ditjen Pajak bagi BPK, juga membuat BPK terus menduga-duga berapakah sebenarnya potensi penerimaan pajak negara dan informasi yang tidak akurat.

Informasi yang tidak akurat adalah informasi sampah yang tidak ada manfaatnya bagi pengambilan keputusan, kemudian menjelaskan pula bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sektor publik dan dunia usaha Indonesia masih belum mengalami banyak kemajuan, dikarenakan lambannya perbaikan sistem hukum di Indonesia dan sistem informasi akuntansi (Siti Kurnia, 2011).

Berkembang pesatnya teknologi informasi dan kemungkinan perubahan informasi (Mahdi Salehi dan Abdipour, 2011:76), tetap saja komponen *brainware* sangat penting, karena keterlibatan sumber daya manusia sebagai pemantau,

pengoperasi dan pengguna sistem informasi memberikan dampak kepada manajemen serta ikut menentukan kesuksesan organisasi (Azhar Susanto, 2008:253).

Sistem informasi tidak semata mengintegrasikan komponen *hardware, software, brainware*, jaringan komunikasi maupun *data base* serta prosedur (McLeod, 2007:29). Keharmonisan komponen SDM merupakan bagian terpenting dengan komponen lainnya didalam suatu sistem informasi sebagai hasil dari perencanaan, analisis, perancangan, dan strategi implementasi yang didasarkan kepada komunikasi diantara sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu organisasi (Azhar Susanto, 2008:253).

Apabila setiap komponen di dalam sistem informasi akuntansi tidak terintegrasi secara harmonis resiko berantai yang akan muncul, diantaranya adalah adanya ketidaksesuaian antara informasi pada manajemen tingkat bawah, menengah dan manajemen tingkat atas, bahkan pengguna *ekstern*, untuk sesuatu yang sama (Azhar Susanto, 2008:63).

Menurut Mahdi Salehi (2011) bahwa implementasi sistem informasi akuntansi dipengaruhi struktur organisasi, perubahan struktur organisasi ini dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan.

Penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan

lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Struktur organisasi merupakan salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya, maka logis jika strategi dan struktur harus terkait erat, jika manajemen melakukan perubahan terhadap organisasi maka struktur organisasi pun perlu dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan ini (Robins dan Judge, 2007:236). Kemudian Nagappan et al., (2009:1) memaparkan pendapat Conway's Law bahwa sistem informasi yang didesain untuk organisasi merupakan salinan struktur komunikasi antar unit di dalam organisasi, sehingga kualitas produk sistem informasi sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi.

Sistem informasi merupakan proses yang rumit, melibatkan interaksi antara manusia, proses, dan alat untuk mengembangkan sistem, dimana pengembangannya biasa dilakukan oleh tim yang terdiri dari sejumlah individu, dan tim dalam membangun sistem informasi harus memperhatikan struktur organisasi (Nagappan et al., 2009:1). Apapun tingkat dalam hierarki organisasi pelaksanaan sistem informasi dapat menciptakan *stress*, sebagai situasi yang dihasilkan akibat hal-hal yang berkaitan dengan perilaku negatif baik manajemen maupun non staf manajemen (Claver et al., 2001).

Pada April 2006 dan April 2007, Dirjen Pajak melakukan perombakan besar-besaran di kantor pajak, sekitar 30 ribu karyawan berputar posisi, hal ini membuat beberapa karyawan kebingungan dan menimbulkan demoralisasi di kantor pajak (Dradjad Wibowo, 2008). Saat ini struktur organisasi Ditjen Pajak

didasarkan pada jenis pajak, dengan struktur organisasi seperti ini pelaksanaan tugas di lapangan seringkali menimbulkan ketidakefisienan yang mengakibatkan pelayanan dan pengawasan tidak optimal (Djazoeli Sadhani, 2005). Belum lagi pegawai yang sering mengeluh karena pekerjaan yang diemban lebih banyak dari sebelumnya (Dadan, 2012).

Seiring dengan perkembangan Dirjen Pajak merasa perlu melakukan perubahan struktur organisasi dari berdasarkan per jenis pelayanan menjadi organisasi dengan struktur berdasarkan fungsi dengan menggabungkan ketiga kantor (KPP, KPPBB dan Karikpa) menjadi KPP Pratama (Nur Ilavi Hudijani, 2007).

Perubahan organisasi dan transformasi menyangkut semua faktor keselarasan manusia, sosial, dan budaya yang melibatkan proses bisnis, dengan signifikan implikasi terhadap model manajemen organisasi, dan gaya manajemen, struktur dan budaya, organisasi dipengaruhi dari sistem informasi dan sistem informasi terkena dampak dari struktur organisasi (Osman Taylan, 2010). Begitu pula menurut Mahdi Salehi (2011) bahwa implementasi sistem informasi akuntansi dipengaruhi struktur organisasi.

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Pengendalian Internal di KPP Bandung Kanwil Jawa Barat I".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Menetapkan masalah-masalah yang akan dianalisis terhadap suatu perusahaan. Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Ditjen Pajak menimbulkan ketidakefisienan.
2. Aplikasi MPN (Modul Penerimaan Negara) Ditjen Pajak kurang akurat dan belum terintegrasi.
3. Lemahnya pengendalian internal di Kantor Pelayanan Pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh struktur organisasi terhadap sistem informasi akuntansi pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
2. Bagaimana sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
3. Seberapa besar pengaruh struktur organisasi terhadap sistem informasi akuntansi dan implikasinya pada pengendalian internal pada KPP Kanwil Jawa Barat I secara parsial.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk meneliti bagaimana pengaruh struktur organisasi terhadap sistem informasi akuntansi dan implikasinya pada pengendalian internal di KPP Bandung Kanwil Jawa Barat I.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi terhadap sistem informasi akuntansi pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
2. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh struktur organisasi terhadap sistem informasi akuntansi dan implikasinya pada pengendalian internal secara parsial pada KPP Bandung Kanwil Jawa Barat I.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

   Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap akuntansi khususnya Pengaruh Struktur Organisasi dan Sistem Informasi Akuntansi dan implikasinya pada Pengendalian Internal.

b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Kegunaan penelitian ini bagi Kantor Pelayanan Pajak adalah dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengaruh struktur organisasi terhadap sistem informasi akuntansi dan implikasinya pada pengendalian internal. Serta dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan sistem informasi akuntansi yang diaplikasikan di KPP Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat I.

c) Bagi Pihak Lain

Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan mengenai Struktur Organisasi dan Sistem Informasi Akuntansi dan implikasinya pada Pengendalian Internal.

1.4.2 Kegunaan Akademis

a) Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu akuntansi mengenai pengaruh struktur organisasi terhadap sistem informasi akuntansi dan implikasinya pada pengendalian internal.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan informasi dan kajian untuk penelitian selanjutnya pada bidang perpajakan.

a) Bagi Instansi Akademik

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa program studi akuntansi dalam aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KPP Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat I

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1.	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
2.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta N0.781
3.	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216
4.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 19-21
5.	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jl. Ir. Sutami No. 1
6.	KPP Pratama Bandung Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.574
7.	KPP Pratama Bandung Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205
8.	KPP Pratama Bandung Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No.372
9.	KPP Pratama Bandung Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
10.	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012.

Tabel 1.2
Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
I	**Tahap Persiapan:**						
	1. Bimbingan dengan Dosen pembimbing	■	■	■	■	■	
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi	■					
	4. Menentukan tempat penelitian	■					
II	**Tahap Pelaksanaan:**						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi	■					
	2. Meminta surat izin penelitian	■					
	3. Penelitian di KPP		■	■	■		
	4. Penyusunan skripsi	■	■	■	■		
III	**Tahap Pelaporan**						
	1. Menyiapkan draft skripsi				■		
	2. Sidang akhir skripsi					■	
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■	
	4. Penggandaan skripsi						■